

Politik dan Perdamaian Aceh: *Hoe Tabu Nanggroe?*

Rahmat Fadhil

Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)

E-mail: rahmat.fadhil@unsyiah.ac.id

Disampaikan dalam Seminar Ekologi, Kebudayaan dan Pembangunan (Ekbudbang) 2016, tentang Peran Politik Sumber Daya Alam dan Kebijakan Agraria dalam Menjamin Keberlanjutan Perdamaian di Aceh, Kampus IPB Dramaga 31 Mei 2016, kerjasama Fakultas Ekologi Manusia IPB, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) IPB, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh (IKAMAPA) IPB dan Sajogyo Institute (SAINS).

PENDAHULUAN

Aceh saat ini merupakan salah satu propinsi paling barat di Indonesia yang terletak di ujung pulau Sumatera dengan ibu kotanya Banda Aceh (dulu Kutaraja). Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang) (Pergub Aceh 2009). Kata Aceh berasal dari berbagai bahasa, Atchin/Acheh (Belanda), Achin (Inggris), Achen/Acheh (Perancis), Asyi (Arab), Achen/Achem (Portugis), A-tsi/Ache (Tionghoa), Acehnese/Achinese (Inggris baru), Acèh (Aceh) (Suryadinata 2005, Pemkot Banda Aceh 1998). Nama Aceh diyakini merupakan perpaduan dari asal-muasal penduduk di wilayah ini, yaitu A-Arab, C-China, E-Eropa, H-Hindia. Jumlah penduduk Aceh saat ini sekitar 4,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 2,32% per tahun dan memiliki 23 kabupaten/kota, 267 kecamatan, 6674 kelurahan/desa (BPS Aceh 2010). Luas wilayah Aceh adalah 57.365,57 km² atau merangkum 12,26% pulau Sumatera, yang terdiri atas 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau. Area terluas yang mencapai 39.294,20 km² adalah lahan hutan, diikuti lahan perkebunan seluas 3.675,01 km² dan lahan pertambangan mempunyai luas terkecil yaitu 4,43 km².

Apa yang menarik dari Aceh?. Bagaimana cerita keberadaannya?. Berikut ringkasan runutan sejarahnya:

A. Fase keberadaan sampai perang melawan Portugis, Belanda dan Jepang

1. Antara tahun 506-581 (75 tahun) diketahui sebuah kerajaan bernama Poli dengan wilayah meliputi Aceh Besar kini (Yan-shou 627, Dupoizat & Marie-France 1998, Crawford 1820), riwayat lain menyebutkan nama kerajaan Lamuri (Kern 1918) nama lainnya Lamkrek/Lam Urik/Rami/Ramni (Arab), Lan Li/Lan-wuli/Lan Wo Li (Tiongkok) (Polo 1971, Pelliot 1878).
2. Tahun 1267-1521 (254 tahun) terdapat kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Meurah Silu/Malik Al-Saleh, politiknya bertentangan dengan Gajah Mada tentang penyatuan Nusantara, memiliki mata uang sendiri, dan dikunjungi oleh Marco Polo, Ibnu Batutah dan Laksamana Cheng Ho (Ricklefs 1991, Hill 1960, Wicks 1992, Moquette & Pierre 1913, Ferrand 1914, Kong 2000, Alfian 1979).
3. Tahun 1496-1903 (407 tahun) berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam *كراجان اچيه دارالسلام* dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) selama 29 tahun. Sekitar tahun 1500-1600 Aceh berperang melawan Portugis. Tanggal 26 Maret 1873 dimulainya perang Aceh dengan Belanda yang ditandai dengan penyerangan Belanda terhadap kerajaan Aceh dengan melepaskan meriam ke daratan melalui kapal perang Citadel van Antwerpen, dan 15 hari kemudian mencapai Masjid Raya Baiturrahman hingga kemudian menewaskan Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler oleh *sniper* mujahidin Aceh. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje menulis buku Rakyat Aceh (De Acehers) yang sudah diterjemahkan kedalam banyak bahasa di dunia (Zentgraaf 1983, Ramli & Gani 1985, Reid 2005, Lombard 2008).
4. Perang Aceh dilanjutkan oleh para ulama antara tahun 1903-1914 (11 tahun) dari mulai Tgk Chik Di Tiro (Muhammad Saman) sampai Tgk Mahyiddin Di Tiro (Teungku Mayed) yang syahid tahun 1910 di Gunong Halimon.

5. Perang rakyat Aceh secara sporadis terus berlanjut di periode tahun 1914-1942 (28 tahun) tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan.
6. Tahun 1942-1944 (2 tahun) perang rakyat Aceh melawan Jepang.

Catatan penting:

Ketika perang kolonial Belanda di Aceh hampir memasuki seperempat abad, Letnan Kolonel Infantri (Pur) G.B. Hooijer yang pernah bertugas di Aceh menulis dalam ikhtisar umum bukunya De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch Indië van 1811 tot 1894, jilid III (terakhir, setebal 480 halaman, tahun 1895), pada halaman 5 sebagai berikut:

“Tidak ada pasukan Diponegoro atau Sentot, baik orang-orang Padri yang fanatik maupun rombongan orang-orang Bali atau massa berkuda orang-orang Bone, seperti yang pernah diperagakan oleh para pejuang Aceh yang begitu berani dan tak takut mati menghadapi serangan, yang begitu besar menaruh kepercayaan pada diri sendiri, yang sedemikian gigih menerima nasibnya, yang cinta kemerdekaan, yang bersikap sedemikian fanatik seolah-olah mereka dilahirkan untuk menjadi gerilyawan bangsanya. Oleh sebab itu perang Belanda di Aceh akan tetap menjadi sumber pelajaran bagi pasukan kita. Dan karena itu pula saya menganggap tepat sekali jika jilid III atau terakhir sejarah perang (Belanda di Hindia Belanda) itu seluruhnya saya peruntukkan guna menguraikan peperangan di Aceh. Namun dari semua pemimpin peperangan kita yang pernah bertempur di setiap pelosok kepulauan ini, kita mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu gagah berani dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh; wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban yang jauh melebihi wanita-wanita lain”.

B. Fase Kebangkitan Pra-Kemerdekaan dan Kemerdekaan Indonesia hingga kini

1. Bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Sarekat Islam, sebuah organisasi dagang Islam yang didirikan di Surakarta pada tahun 1912, tiba di Aceh pada sekitar tahun 1917.
2. Muhammadiyah membangun sebuah sekolah Islam di Banda Aceh tahun 1929, kemudian diikuti organisasi sosial Muhammadiyah pada tahun 1923.
3. Kemudian pada tahun 1939, Partai Indonesia Raya (Parindra) membukan cabangnya di Aceh, menjadi partai politik pertama di sana. Pada tahun yang sama, para ulama mendirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), sebuah organisasi anti-Belanda, merupakan cikal bakal lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) nantinya di Indonesia.
4. Tahun 1945-1949 Aceh tergabung dalam Republik Indonesia Serikat yang kemudian berganti ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950.
5. Daud Beureueh (ulama dan gubernur sipil/militer Aceh) mendirikan Negara Islam Indonesia Aceh tahun 1953-1962.
6. Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Negara Aceh Sumatera tanggal 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, disebut juga Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
7. Operasi Militer Indonesia (Darurat Militer) di berlakukan di Aceh dari tahun 2003-2004 yang mewaskan sekitar 2000 orang dari kalangan GAM, rakyat sipil, dan TNI/Polri.
8. Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi dan tsunami (Aceh: ie beuna) yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.
9. Pada 15 Agustus 2005, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia akhirnya sepakat untuk menandatangani persetujuan damai (MoU) dan sekaligus mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Kesepakatan yang memberikan hak *self government* kepada Aceh yang kemudian di payungi oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian GAM menjadi pemenang Pilkada (pemilihan kepala daerah) di sejumlah kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati di sebahagian besar daerah di Aceh, serta mendirikan partai (Partai Aceh, tahun 2007) untuk dapat mengikuti Pemilu.
10. Tahun 2007-2012, Irwandi Yusuf (Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM) dan M.Nazar (aktifis Sentral Informasi Referendum Aceh/SIRA) menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh pertama pasca konflik RI dan GAM (Jafar *et al.* 2006). Tahun 2009 Pemilu pasca konflik pertama dan dimenangkan oleh Partai Aceh.

11. Tahun 2012-2017, Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh, dan tahun 2014 kembali Partai Aceh menjadi pemenang dalam Pemilu Legislatif di Aceh (Fadhil 2012, Fadhil & Sulaiman 2014).

Hoe Taba Nanggroe

Kalimat *'hoe taba nanggroe'* (bahasa Aceh) bermakna 'kemana kita bawa negeri' adalah untuk menjelaskan dua hal sekaligus. Pertama, dalam konteks budaya, penggunaan kata-kata dengan bahasa Aceh untuk menunjukkan salah satu bentuk bahasa/budaya yang ada di Aceh, selain bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Gayo di Aceh bagian tengah, bahasa Alas di Aceh Tenggara, bahasa Aneuk Jamee di Aceh Selatan, bahasa Singkil dan bahasa Pakpak di Aceh Singkil, bahasa Kluet di Aceh Selatan, bahasa Melayu Tamiang di Aceh Tamiang, di Simeulue bagian utara juga dijumpai bahasa Sigulai dan bahasa Lekon, sedangkan di selatan simeulue di jumpai bahasa Devayan dan bahasa Haloban. Ragam bahasa biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi ada suku yang melatari semuanya. Kedua, dalam konteks politik, ini saya maksudkan sebagai pertanyaan kepada kita semua *'Ureng Aceh'* (orang Aceh), kemana kita akan membawa kondisi negeri yang unik itu dalam percaturan lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk membawa kemana, maka kita perlu mengetahui sejarah apa yang telah dan pernah kita miliki, kondisi saat ini dimana kita berada dan bagaimana kita merencanakan masa depan kita secara bersama-sama dengan optimis.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan penelusuran kebelakang (*backward tracking*), dan menganalisis situasional tentang Politik, Perdamaian dan Pembangunan Aceh sebagai bagian dari rencana dan tindakan prospektif masa depan yang harus dipersiapkan. Analisis ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak di Indonesia dan Aceh, terutama para pengambil kebijakan untuk menyadari apa yang telah dilakukan dan memahami apa yang semestinya mereka lakukan dalam memperbaiki keadaan. Sekaligus semoga bermanfaat bagi masyarakat secara luas, terutama generasi muda dalam mengisi kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dan ber-Aceh serta memilih peran kontribusinya sebagai pemberi solusi, bukan sebagai 'pemaki' keadaan. Sehingga Aceh dan *'Urueng Aceh'* dalam pergulatan politik nasional dan internasional dapat menjadi 'modal' dan 'model' yang sesungguhnya.

POLITIK DAN PERDAMAIAN

Pada bagian ini saya hendak menjelaskan beberapa hal yang penting terkait politik dan perdamaian, pemerintah dan parlemen Aceh, konflik internal mantan kombatan GAM, pemakaran wilayah dan terakhir gagasan mewujudkan kesultanan Aceh.

Pilkada, Pemilu, Pemerintah dan Parlemen Aceh

Proses demokrasi lewat Pemilu dan Pilkada di Aceh, masih terlalu sulit untuk dapat dikatakan berlangsung dengan demokratis dan berkualitas. Konflik kekerasan bersenjata selama proses pesta demokrasi di Aceh baik Pilkada tahun 2006, Pemilu tahun 2009, Pilkada 2012 dan Pemilu 2014 hampir mewarnai di setiap tahapan pemilihan (Fadhil 2012, Fadhil & Sulaiman 2014). Banyaknya kekerasan fisik maupun jiwa selama proses Pemilu telah menjadikan suasana pemilihan yang agak susah untuk dapat dikatakan berkualitas dan demokratis (Kingsbury 2016). Bahkan menurut Adan (2016) sesama mantan pejuang GAM yang berbeda afiliasi politik (berbeda partai politik, seperti Partai Nasional Aceh atau lainnya) masih sangat mudah untuk saling membunuh. Sehingga dalam kaidah Aceh hal ini sering disebut dengan *"Watee dalam glé sapeue pakat, oh troh u darat ka laén keunira"* (Saat di gunung se-iya se-kata, ketika sudah di darat lain cerita). Atau dalam istilah lain *"Di laoet muban pakat, u darat laen takira. Di glee sikrek kafan saboeh keurenda, di kota teuma ija kafan ta peugala"* (Di laut kita se-iya se-kata, di darat lain cerita. Di gunung satu kafan satu keranda, di kota pula kain kafan kita jadikan jualan). Inilah cerita bakda konflik.

Padahal Pemilu sesungguhnya adalah suatu kesaksian. Artinya memberikan suara dalam pemilu/pilkada merupakan kesaksian pemilik suara terhadap kandidat. Ini bermakna, jika suara diberikan kepada calon yang tidak memenuhi syarat secara syar'i, maka suara tersebut sama dengan memberikan kesaksian palsu. Kecurangan dan pemalsuan dalam pemilu sama artinya dengan merusak masa depan bangsa, menempatkan orang-orang lemah ke tempat orang-orang kuat,

meletakkan para pengkhianat di tempat orang jujur, dan menempatkan seorang penipu yang hina di tempat seorang pakar yang mulia (Ahmad 2016).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa pilkada Aceh pasca konflik RI dan GAM dimulai sejak tahun 2006 (terpilih gubernur Irwandi Yusuf & wakilnya Muhammad Nazar) dengan 38,20 % suara, dan 2012 (Zaini Abdullah & Muzakkir Manaf) sebanyak 55,78 % suara, yang keduanya adalah mantan GAM. Saya tidak bercerita lagi pemerintahannya Irwandi Yusuf dan M.Nazar, tapi saya langsung fokus ke pemerintahannya Zaini Abdullah (mantan Menteri GAM) & Muzakkir Manaf (mantan Panglima GAM) yang kemudian disingkat dengan Pemerintahan ZIKIR. Yang kita semua ingat bahwa Pemerintahan Zikir telah berjanji kepada seluruh rakyat Aceh untuk mewujudkan 21 janjinya selama memerintah di Aceh dari tahun 2012 – 2017 (Tabel 1).

Tabel 1. 21 Proram ZIKIR saat kampanye Pilkada

No	Program	Realisasi	Nilai
1	Wewujudkan pemerintahan Aceh yang bermartabat dan amanah	Sebahagian	B
2	Mengimplementasikan dan menyelesaikan turunan UUPA	Ada upaya	C
3	Komit menjaga perdamaian Aceh sejalan dengan MoU Helsinki	Sebahagian	B
4	Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Islam di semua sektor kehidupan masyarakat	Sebahagian	B
5	Menyantuni anak yatim dan kaum duafa	Sebahagian	B
6	Mengupayakan jumlah penambahan kuota haji Aceh	Belum	D
7	Pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar	Belum	D
8	Naik haji gratis bagi anak Aceh yang sudah akil baliq	Belum	D
9	Menginventarisir kekayaan dan sumber daya alam Aceh	Sebahagian	B
10	Menata kembali sektor pertambangan di Aceh	Ada upaya	C
11	Menjadikan Aceh layaknya Brunei Darussalam dan Singapura	Belum	D
12	Mewujudkan pelayanan kesehatan gratis yang lebih bagus	Ada upaya	C
13	Mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri	Belum	D
14	Pendidikan gratis dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi	Belum	D
15	Pemberian Rp.1.000.000 (satu juta)/Kepala Keluarga/bulan dari hasil dana minyak & gas	Belum	D
16	Mengangkat honorer PNS	Sebahagian	B
17	Meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh	Ada upaya	C
18	Membuka lapangan kerja baru	Belum	D
19	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat	Ada upaya	C
20	Memberantas kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran	Ada upaya	C
21	Mengajak kandidat lain untuk bersama-sama membangun Aceh	Belum	D
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)		1,86	D

Keterangan:

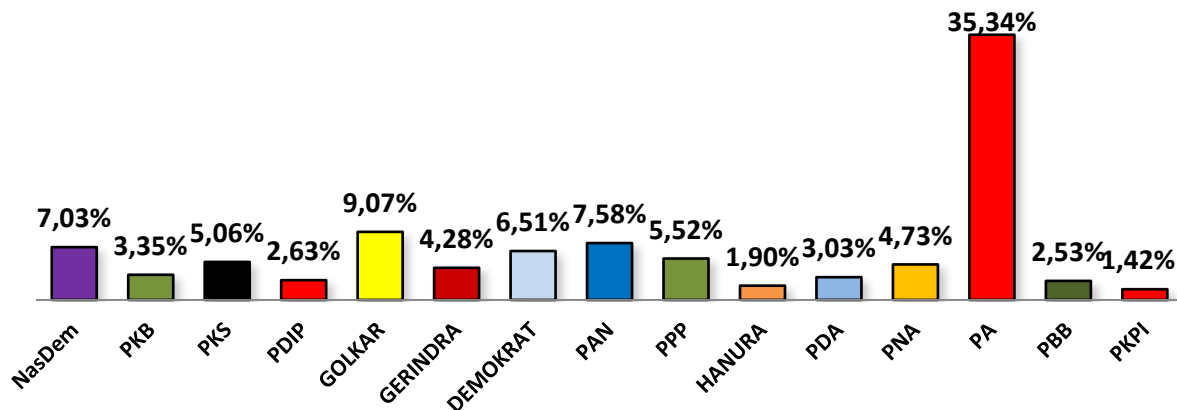
Sudah terealisasi, dengan nilai	A
Sebahagian terealisasi, dengan nilai	B
Ada upaya merealisasikannya, dengan nilai	C
Belum merealisasikan, dengan nilai	D

Dari 21 ‘mata kuliah’ pembangunan yang dipilih Pemerintahan Zikir, terlihat bahwa secara umum bila kita nilai dalam ukuran kuliah dengan huruf A nilai tertinggi 4 dan huruf D nilai terendah adalah 1, maka terlihat bahwa nilai Pemerintahan Zikir saat ini mempunyai nilai B dan C masing-masing sebanyak 6 item (gabungannya menjadi 12 item), nilai D sebanyak 9 item dan tidak ada nilai A. Sehingga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diakhir semester ini (karena 2017 sudah Pilkada lagi) adalah 1,86. Ukuran ini hampir mirip dengan hasil evaluasi kinerja pemerintah propinsi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015, menempatkan Pemerintah Aceh dalam kategori CC untuk capaian kinerja pemerintahan. Kendati berada pada kategori cukup, tapi capaian ini menyiratkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh (Paskarina 2016). Dalam istilah Fukuyama (2005) menyebutkan bahwa kegagalan untuk mengatasi persoalan lemahnya kinerja pemerintahan dapat mengarah pada munculnya stigma pemerintahan yang in-efektif, bahkan pemerintahan yang gagal. *Nyan ban*.

Kalau dalam kuliah ada sistem DO (*drop out*) namun sistem pemerintahan belum ada mekanismenya. Penilaian ini mungkin subjektif menurut anda, tetapi semua kita boleh mengembangkan model penilaian masing-masing yang lebih mendekati kepada kebenaran dalam penelusuran (riset) secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai ini bukanlah untuk

'menunjuk' hidung terhadap kemampuan Pemerintah Aceh sekarang, tetapi sebagai bahan evaluasi kita bersama tentang *nanggroe endatu* (negeri nenek moyang) yang telah di amanahkan kepada kita dan apa yang telah kita lakukan sejauh ini di Aceh. Inilah vitalitas yang dimiliki Pemerintah Aceh yang ada hari ini.

Begitu juga dengan Pemilu, dua periode pemilu pasca konflik dimenangi oleh mantan GAM yang berafiliasi dalam Partai Aceh, sehingga berhasil menempatkan anggota parlemennya di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota). Data Pemilu terakhir tahun 2014 menempatkan PA sebagai pemenang dengan jumlah 35,34 % suara, mengalahkan partai-partai lokal dan nasional lainnya dengan jarak yang cukup jauh (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun 2014 (KIP Aceh 2014, Fadhil & Sulaiman 2014)

Apa yang bisa kita pelajari dari naiknya kombatan dan aktivis kemerdekaan Aceh di pentas panggung parlementaria republik di propinsi dan kabupaten/kota di Aceh?. Ternyata tidak jauh berbeda dengan parelemen-parlemen yang sudah ada jauh sebelum-sebelum sekarang ini. Kita rakyat Aceh dan publik Indonesia sesungguhnya berharap ada sesuatu yang baru dalam dialektika politik Aceh pasca konflik, yang warnanya dapat terlihat jelas melalui berbagai sikap, kebijakan dan tindakan anggota dewan yang mewakili rakyat di panggung parlementaria itu. Kita bermimpi tentang cita-cita 'merdeka' dalam warna pembangunan dan dinamika politik yang berbeda dari yang sudah ada, dan bukan hanya sekedar beda, tetapi menampilkan parlemen yang penuh dengan inovasi politik dan produk-produk legislasi yang menyentuh secara efektif masyarakat yang diwakilinya. Namun pada akhirnya, kita semua kemudian hanya bisa memaklumi bahwa setelah dua periode kemenangan Partai Aceh di Aceh, demikianlah keadaannya politik yang kita nikmati sekarang. Inilah yang disebut Mahathir Mohamad (mantan perdana menteri Malaysia) sebagai tantangan bagi rakyat Aceh yang harus menyadari bahwa proses mengangkat senjata berbeda dengan proses mengangkat bicara dan kata-kata (negoisasi politik) (Mohamad 2011). Meninjam pendapat Ishak (2016) bahwa realitas politik di Aceh, jangankan berkontribusi positif untuk konstruksi demokrasi nasional, bahkan proses berdemokrasi di Aceh sendiri justru cenderung menghancurkan modalitas demokrasi yang telah ada.

Pemekaran Wilayah dan Menggagas Kesultanan Aceh

Salah satu isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius ditengah masalah-masalah Aceh yang dihadapi sekarang, munculnya ide pemekaran wilayah Aceh menjadi beberapa bagian dalam bentuk propinsi baru seperti propinsi ALA (Aceh Leuser Antara) dan Propinsi ABAS (Aceh Barat Selatan). Isu pemekaran ini berkembang secara pasang surut mewarnai hari-hari dalam pergumulan diskursus para elit dengan masing-masing turunan pendukungnya di Aceh. Menurut Prang (2013) isu pemekaran sempat mengemuka pada era konflik dulu, kemudian tenggelam saat Darurat Militer dan Darurat Sipil (2003-2004), begitu seterusnya hingga saat ini. Ide pemekaran ini lahir dari pandangan bahwa pendapatan daerah yang dihasilkan tidak sebanding dengan kesejahteraan warganya, termasuk perhatian Pemerintah Aceh yang dianggap tidak merata untuk semua daerah.

Menurut saya ide pemekaran ini akan terus menggema sepanjang perjalanan waktu dalam beragam bentuk dan gerakan. Seberapa besar gerakan dan pengaruhnya tentu sangat tergantung para pihak yang mengembangkannya. Namun bagaimana solusi yang dapat digagas, agar persoalan ini menemukan jalan terbaiknya. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua rakyat Aceh. Karena sesungguhnya memecahkan Aceh menjadi beberapa bagian merupakan masalah lanjutan tersendiri yang tidak sesederhana seperti semudah yang kita bayangkan. Dari berbagai faktor historis dan *socio-culturist*, Aceh memiliki makna tersendiri yang membedakannya secara nyata dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karenanya perlu dipikirkan sejak dini bagaimana menguraikan masalah ini secara holistik, dinamis dan mencapai kebaikan bagi semua wilayah dan daerah di Aceh.

Salah satu ide yang patut untuk dipertimbangkan adalah menghidupkan kembali bentuk kesultanan di Aceh. Berdasarkan suatu diskusi saya dengan seorang tokoh Aceh di Bogor, Bapak Dr. Tajuddin Bantacut, ide Kesultanan Aceh boleh jadi sebagai alternatif bagi meleraikan perdebatan soal pemekaran yang selalu mengemuka sepanjang waktu itu. Ide dasar kesultanan Aceh ini adalah dengan menetapkan batasan wilayah Aceh seperti yang ada sekarang, dimana posisi Aceh adalah dengan wilayah pada sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kemudian setiap wilayah dapat dibagi berdasarkan kedekatan sosial budayanya, seperti wilayah ALA, Wilayah ABAS, Wilayah Pase (Aceh Utara dan sekitarnya) dan Wilayah Aceh SABANDI (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya) atau lebih banyak atau lebih sedikit lagi. Dimana wilayah itu bisa dipimpin oleh gubernur-gubernur atau nama lainnya dan tingkat propinsi (kesultanan) dipimpin oleh Sultan atau sebutan lain. Jadi dengan demikian maka peran Sultan sebagai kepala daerah di tingkat propinsi memiliki empat atau lebih gubernur-gubernur yang memiliki perhatian lebih banyak kepada wilayahnya masing-masing. Untuk lebih detilnya bagaimana bentuk, aplikasi dan pembagian tugas perlu dirumuskan secara lebih mendalam. Walau model ini akan berbeda dengan berbagai bentuk model pengelolaan wilayah di propinsi-propinsi lain di Indonesia. Namun kalau ini adalah sebuah kebaikan, kenapa kita tidak mengusahakannya dengan penuh keikhlasan.

PEMBANGUNAN ACEH

Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kinerja pembangunan Aceh saat ini. Salah satu bahasan yang penting adalah berkaitan dengan otonomi khusus (otsus) pasca konflik dan bencana tsunami (sekitar 10 tahun terakhir). Menurut Hood dan Margetts (2007) menyebutkan ada empat instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk bekerja dengan efektif, yakni *nodality* (informasi), *authority* (kewenangan), *treasure* (anggaran) dan *organization* (organisasi). Dari keempat instrumen tersebut, yang dianggap menjadi persoalan penting bagi Pemerintah Aceh dalam konteks otonomi daerah adalah instrumen anggaran, sehingga instrumen ini menjadi aspek yang sangat strategis untuk diperbincangkan.

Sejak tahun 2008, Aceh mulai menerima dana otonomi khusus sebagai tambahan sumber daya fiskal yang sangat signifikan, sehingga menjadikan Aceh salah satu propinsi dengan sumber daya fiskal terbesar di Indonesia. Jika tanpa dana otsus, Aceh berada pada urutan ke 15 dalam nilai pendapatan daerah per kapita, dan dengan adanya dana otsus meningkat ke urutan 7 tertinggi di Indonesia. Penerimaan dana otsus ini akan berlangsung selama 20 tahun sampai dengan tahun 2027 dengan proyeksi total penerimaan sebesar Rp. 100 trilyun dengan asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun (DSF 2011).

Jumlah dana otsus yang sudah diterima Pemerintah Aceh sejak 2008 sampai 2014 adalah sebesar 35 trilyun rupiah dan tahun 2015 mencapai 7 trilyun rupiah. Dana otsus digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sementara itu, sejak tahun 2012 Pemerintah Aceh juga menerima Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDBH Migas), yaitu 55% dari penerimaan pertambangan minyak, 40% dari penerimaan pertambangan gas bumi dengan peruntukan sebesar 30 % pada sektor pendidikan dan 70 % untuk untuk pembiayaan program dan kegiatan lainnya (Qanun No. 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Dana

Otsus). Pertanyaan yang penting kemudian untuk dijawab adalah, sudah sesuaikah penggunaan dana otsus dan TDBH migas tersebut?.

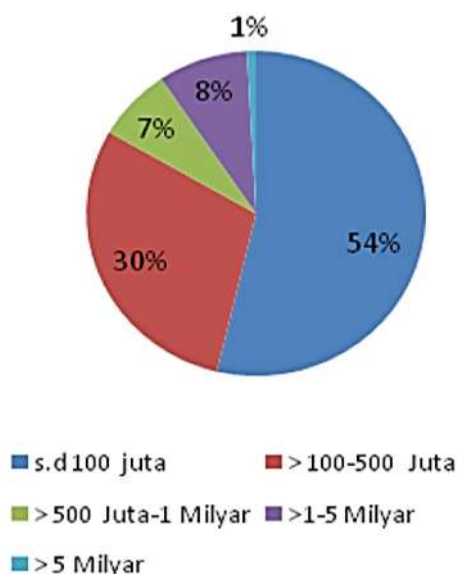
Sudah lebih tujuh tahun berjalan, mari kita lihat beberapa capaiannya. Menurut Fahlevi (2015) indikator-indikator kesejahteraan rakyat meningkat di Aceh, namun tetap dibawah rata rata nasional dimana tingkat kemiskinan menurun dari 26,30% (2008) menjadi 21,97% (2012), namun masih jauh dari rata-rata nasional 11,66% (2012). Laju pertumbuhan ekonomi meningkat, namun masih dibawah rata-rata nasional, bahkan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 8,71% (2008) menjadi 10,03% (2013). Tingkat kelulusan Ujian Nasional Aceh masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih sangat besar. Fakta lain adalah seperti Tabel 2.

Tabel 2. Beberapa Capaian Pembangunan

Kriteria	Propinsi Aceh	Standar / Ranging
Tingkat kelulusan ujian Nasional Aceh (2012)	Peringkat 28	Peringkat nasional (dari 33 Provinsi)
Kemampuan lulusan SMA/SMK/MA yang bisa menembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	Peringkat 31	Peringkat nasional (dari 33 Provinsi)
Angka Partisipasi Pendidikan (APP)	Sekolah dasar (96,95%), SMP(77,40%), SMA (62,12%)	Ideal 100%
Angka kematian bayi (AKB)	Menurun menjadi 34 jiwa dari 1000 lahir hidup (2010)	31 jiwa dari 1000 lahir hidup
Angka Kematian Ibu (AKI)	191 per 100.000 kelahiran hidup (2012)	112 per 100.000 kelahiran hidup (2014)
Proporsi rumah tangga tanpa akses sanitasi	34,58%	22,78% (2009)

Diolah dari berbagai sumber

Menurut laporan Decentralization Support Facility (2011) disebutkan bahwa proses perencanaan dan penyusunan program kegiatan yang dibiayai oleh dana otsus menjadi salah satu titik lemah dalam tata kelolanya. Survei terhadap 136 proyek di 3 kabupaten dan 2 kota menunjukkan bahwa 54 persen usulan kegiatan berasal dari pihak eksekutif kabupaten/kota (Dinas dan Kepala Daerah), 30 persen merupakan usulan dari calon penerima manfaat (seperti sekolah dan rumah sakit), masing-masing 7 persen berasal dari tokoh masyarakat dan anggota DPRK, dan hanya 8 persen yang berasal dari proses perencanaan melalui Musrenbang (Gambar 2).



Gambar 2. Sebaran Skala Kegiatan Dana Otsus Berdasarkan Persentasi dan Jumlah Kegiatan

Selain itu ditemukan juga bahwa sebesar 53 persen paket pekerjaan bernilai di bawah Rp 100 juta, tidak strategis dan tidak memiliki daya ungkit pembangunan (misalnya pagar sekolah, paving block dan toilet) dan 26,5 persen hasil pekerjaan proyek otsus belum berfungsi optimal (DSF 2011). Menurut laporan BPK Perwakilan Aceh, sebesar Rp 5,1 triliun atau 24,17 persen dana otsus periode 2008 sampai 2012 tidak tepat sasaran atau belum fokus penggunaannya.

Lalu bagaimana tantangan setelah 2027, masih menurut Fahlevi (2015) berpendapat diantara tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah masalah kemandirian keuangan (pendapatan asli daerah) yang masih rendah. Besarnya alokasi belanja pegawai Pemerintah Aceh yang harus mengeluarkan dana sebanyak Rp 1.621 triliun lebih, sementara dana alokasi umum hanya Rp 1,092 triliun lebih. Tantangan ini memang tidak mudah dilalui mengingat belanja yang besar selama otsus sementara pendapatan asli daerah (PAD) belum berkontribusi besar. Catatan penting yang mesti mendapat perhatian bahwa melimpahnya pendapatan Aceh saat ini semestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi PAD yang berkesinambungan dengan berbagai strategi kebijakan strategis mesti dikembangkan.

KAJIAN PEMBANGUNAN ACEH

Kajian-kajian mendalam tentang Aceh telah banyak melahirkan ilmuwan dan pakar di berbagai bidang di nusantara dan dunia. Diantara sekian banyak catatan tentang Aceh adalah terekam di Universiteit Leiden di Netherland (Belanda). Bahkan di beberapa museum dunia, seperti di Inggris, Perancis dan Jerman, masih menyimpan berbagai dokumen tentang Aceh. Diantara sumber referensi tentang Aceh terbesar adalah yang tersebar di dunia maya. Media online menjadi sarana dokumentasi cukup efektif selama ini untuk menemukan rujukan dan referensi, seperti yang tersimpan secara maya di website <http://acehbooks.org/> dan Nationaal Museum van Wereldculturen di <http://collectie.wereldculturen.nl/> (Gambar 3).



Gambar 3. Tampilan website koleksi informasi dan foto-foto tentang Aceh yang cukup lengkap

Di Kuala Lumpur, Malaysia, catatan dan dokumen Aceh sangat banyak juga beredar. Mulai dari daerah yang bernama Yan di Keudah yang masih sangat banyak petutur bahasa Aceh, dan terdapat suatu kampung bernama Kampung Acheh, tempat lahir dan dibesarkannya Profesor Dr. Tan Sri Dato' Seri Sanusi bin Junid (menantu cucu Abu Daud Beureuh), juga memiliki beberapa dokumen tentang Aceh. Tan Sri Sanusi sendiri juga memiliki cukup banyak koleksi tentang Aceh. Sebagai pengetahuan kita saja bahwa Tan Sri Sanusi merupakan sosok hidup yang cukup banyak memahami tentang konflik Aceh, Hasan Tiro, Abu Beureuh, GAM sampai masalah dinamika politik Aceh di Malaysia dan dunia. Tan Sri Sanusi merupakan tangan kanan Mahathir Mohamad di UMNO Party pada masa jayanya, pernah menjabat sebagai sekretaris utama partai UMNO, menteri pembangunan luar bandar, menteri pertanian dan juga menjadi Presiden *International Islamic University Malaysia* (IIUM). Beliau juga yang menggagas untuk menghidupkan kembali The Aceh Code, yaitu 21 titah raja Aceh yang diperkenalkan oleh Sultan Alaidin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah dalam membangun negeri. Inti sari dari The Aceh Code ini merupakan penjabaran nilai-nilai utama dalam kehidupan yaitu jujur, berani, disiplin, rajin dan setia. Sifat-sifat ini sama persis seperti yang ada dalam semangat Bushido di Jepang, semangat Hwarang di Korea dan semangat Jinsheng di Taiwan.

Informasi lengkap tentang Tan Sri Sanusi dan tulisan-tulisannya berkaitan Aceh dan Malaysia dapat dipelajari di www.sanusijunid.blogspot.co.id.

Kajian Aceh juga banyak dilakukan dalam bentuk seminar, simposium dan konferensi di dalam dan luar negeri. Salah satu konferensi internasional tentang Aceh yang masih eksis sampai saat ini adalah Aceh Development International Conference (ADIC) yang digagas sejak tahun 2010 di kampus Universiti Putra Malaysia, ketika itu penulis menjadi salah satu panitianya. Konferensi ini merupakan gagasan dari para ilmuwan Aceh di Malaysia yang kemudian turut mendirikan International Assosiation of Acehnese Scholars (IAAS) bersama-sama dengan Persatuan Pelajar Aceh Malaysia, The Aceh Club (miliknya Tan Sri Sanusi), Persatuan Masyarakat Aceh Malaysia, Saudagar Aceh Malaysia dan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Konferensi ADIC ini setiap tahunnya mengumpulkan berbagai artikel tentang pembangun Aceh dalam bentuk proseding dari berbagai perspektif peneliti, baik yang ditulis oleh ilmuwan Aceh maupun ilmuwan lainnya di nusantara dan dunia tentang Aceh. Sejarah konferensi ADIC ini penulis tulis dengan lengkap di jurnal Aceh Scientific Journal dengan judul ADIC 2010: Pertemuan Gagasan dan Pembangunan Aceh (Fadhil *et al.* 2011a).

Dalam kaitan penelitian, secara spesifik penulis juga telah berkontribusi untuk memajukan Aceh lewat bahasa melalui publikasi artikel ilmiah pertama dengan abstrak berbahasa Aceh yang diindex oleh Scopus. Dalam jurnal yang terbit di Rumania itu, dibenarkan untuk mencantumkan abstrak dalam dua bahasa lainnya selain bahasa utamanya adalah bahasa Inggris (English). Sehingga penulis memilih menggunakan abstrak dalam bahasa Aceh, Indonesia dan Inggris sekaligus. Publikasi artikel ilmiah dengan abstrak berbahasa Aceh ini merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Untuk lebih lengkapnya dapat dipelajari di website <http://www.bioflux.com.ro/aac/> dengan kata kunci nama penulis (Fadhil *et al.* 2011b). Inilah salah satu cara kita memaknai kuasa bahasa.

KITA DAN ACEH

Pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak bangsa ini memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia, yang pada waktu bersamaan juga memperdalam kesadaran internalisasi kita sebagai Aceh dan sebagai Indonesia. Nasehat untuk *ureung* (orang) Aceh: *"Geutanyoë Acèh beu-ta seumiké bibeueh! Hudép meu-adab dan maté mulia! Geutanyoë manusia, peuneujeuët Po teuh Allah, sibagoë khalifah diateueh ruëng donya nyoë ka geubri tanggông jaweuëb yang akan geusue-uë singoh di yaumil mahsyar. Hana peurantara diantara geutanyoë deungon Allah, peuneujeuët geutanyoë. Hanjeuët taseumiké lagèë seumiké lamiët, meugantung peuë yang geukheun lé Tuan, peujalan peurintah yang ka geugaréh lé Tuan. Meungnyo taseumiké lagèë nyoë maka geutanyoë sabé akan jeuët keu peungikôt gob. Sabé jeuët keu iku gob, han keumah jeuët keu Ulèë. Geutanyoë beutatu'oh hudép santeut bahô deungon bangsa-bangsa laén dalam dônya. Beu-tatu'oh silaturrahim deungon bangsa-bangsa yang kon Islam njang meulaén agama, meulaén budaya, meulaén adat-istiadat deungon geutanyoë. Janjôngan geutanyoë Panghulèë nabi Muhammad SAW ka geungui seubagian rayek nibak watèë gobnyan untuk neupeureunoë Adab ngon akhlaq keu geutanyoë. Ceumarôt-ceumarôt dan seumilot, meu-upat keunoë keudéh nyan kon adab yang geupeureunoë lé Rasulullah SAW. Hudép geutanyoë Acèh mantong jeu-ôh that dalam hudép peuradaban dônya civilization uroë nyoë. Kon meumakna modern civilization ala Barat nyan yang paléng meu-adab. Yang jikheun modern lé awak Barat uroë nyoë sibeutôi jih ka meugisa keu peradaban masa jahilijah sigohlom Nabi Muhammad SAW. Nyoe keuh keuneubah yang ka geupeudong lé endatu geutanyoë "adat bak Po teuh Meureuhom hukôm bak Syah kual" nyankeuh adab yang modern yang peureulèë geutanyoë puga keulai. Adab dan sopan santun raja-raja yang ka geupeusedeurhana deungon keuleumah-lembutan dan keseuderhanaan para ulama. Nyoë keuh pembangunan adab masa ukeuë yang teungoh jimita lé kebudayaan Barat. Disampéng nibak nyan geutanyoë beutatu'oh pakriban tahudép dan beutatakri pajan peureulèë tamaté. Beu-na lam kawan geutanyoë yang dijeuët kheun salah keu buët yang salah, watèë ureuëng laén bandum seungab. Seumiké "bah ta-iëm asai bèk karu" nyoë hanjeuët tateurimong lé geutanyoë Acèh. Saweub endatu geutanyoë Acèh ka le that maté bak geupeutheun nanggroë Acèh keu geutanyoë aneuk cuco. Meujuta ureuëng Acèh ka keureubeuën bak*

geupeutheun tanoh ië Acèh yang tacinta nyan, keu geutanyoë Acèh keuturunan jinoë dan keuturunan ukeuë.

Kita selaku bangsa Indonesia dan Aceh, perlu menyadari bahwa ada banyak skenario dunia global yang sedang dirancang secara halus maupun terang-terangan untuk menyerang dan memporak-porandakan kembali persatuan dan persaudaran kita sebagai sebuah bangsa Melayu yang ada di Nusantara Raya ini. Inilah yang disebut sebagai *invisibel hand*, yaitu suatu mekanisme tangan tak tampak yang menggerakkan kekuatan untuk meruntuhkan bangunan republik kita, yang mendesain berbagai bentuk opini kebencian, agar menjadi candu yang membuat kita ketagihan bertengkar. Bila semua sudah sakau, kita tinggal menunggu waktu untuk saling tuduh bahkan saling membunuh (Pangdam IM 2016).

Semoga apa yang terjadi di Aceh menjadi inspirasi bagi kita semua, bukan saja untuk kita yang hidup di zaman ini, tetapi juga bagi generasi-generasi sesudah kita nantinya. Kita mencintai agama, bangsa dan negara ini sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak perlu terlalu sibuk menunjuk orang lain untuk memperbaiki keadaan yang ada sekarang, apalagi saling menyalahkan, tetapi marilah kita menunjuk diri kita sendiri dengan memilih jalan kontribusi kita masing-masing. Memberikan yang terbaik bagi agama, bangsa dan negara sampai ketika ajal memanggil kita, tetap dalam keistiqamahan yang paripurna dan penuh kebaikan.

KESIMPULAN

Perdamaian dan pembangunan Aceh yang telah dicapai sekarang merupakan pengorbanan dan jasa banyak pihak. Semua komponen bangsa kita yakin dan percaya punya andil di dalamnya. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang tidaklah menyebabkan kita jumud dan pesimis dalam menatap masa depan yang lebih baik. Keyakinan akan mampu menjadi lebih baik dan bermartabat seharusnya senantiasa terpatri dalam sanubari kita semua. Sebagai orang yang beragama kita yakin janji Tuhan adalah kepastian, dan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan berbagai macam cara kita berkontribusi untuk memperbaiki keadaan adalah sangat bermanfaat bagi kita semua. Tidak hanya pada masa kini tetapi menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua.

REFERENSI

- [DSF] Decentralization Support Facility. 2011. Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh. Laporan Penelitian Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan DSF, Jakarta.
- [Pangdam IM] Panglima Kodam Iskandar Muda. 2016. Ceramah Pangdam Iskandar Muda. Seminar Satu Dekade Perkembangan Demokrasi di Aceh dan Kontribusi Bagi Nasional. 16 Mei 2016 di AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala. Kerjasama Jaringan Survey Initiative (JSI) dan Unsyiah, IKA Unsyiah, Aceh Connection Foundation serta Elhanief Group.
- [Pergub Aceh] Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh.
- Adan HY. 2016. 'Watee di Gle Sapeue Pakat'. Harian Serambi Indonesia 3 Mei 2016.
- Ahmad J. 2016. Pelajaran Demokrasi dalam Menjemput Takdir Kekuasaan. Seminar Satu Dekade Perkembangan Demokrasi di Aceh dan Kontribusi Bagi Nasional. 16 Mei 2016 di AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala. Kerjasama Jaringan Survey Initiative (JSI) dan Unsyiah, IKA Unsyiah, Aceh Connection Foundation serta Elhanief Group.
- Alfian TI. 1979. Mata Uang Emas Kerajaan-kerajaan di Aceh. Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum, Aceh.
- Crawford FRSJ. 1820. History of the Indian Archipelago Vol 3. A. Constable and Co. pp. 154.
- Dupoizat CG, Marie-France. 1998. Histoire De Barus (Sumatra). Le Site De Lobu Tua. Vol. I: Etudes Et Documents. Association Archipel, MSH PARIS.
- Fadhil R, Bachtiar D, Sayuti M, Syam AM. 2011a. Aceh Development International Conference (ADIC) 2010: Pertemuan Gagasan Pembangunan Aceh. Aceh Scientific Journal 1 (1), 36-45.

- Fadhil R, Endan J, Taip FS, Ja'afar MS. 2011b. Biological performance of Asian catfish (*Clarias batrachus*) (Teleostei, Clariidae) cultured in recirculating aquaculture system. *AAFL Bioflux* 4 (5): 684-690.
- Fadhil R, Sulaiman TMJ. 2014. Jujur dan Demokratiskah Pemilu di Aceh. *Aceh Election Policy Brief* Vol. 2, April 2014. The Aceh Institute, Banda Aceh.
- Fadhil R. 2012. *Kadalisasi Pilkada Aceh: Sebuah Catatan*. Penerbit Stigma, Banda Aceh.
- Fadhil R. 2006. Eksistensi Pengawasan Oleh Panwaslih Aceh, dalam T. Santoso (Ed.), *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*. Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia. Jakarta.
- Fahlevi H. 2015. *Diskusi Dana Otsus: Antara Peran dan Tantangan*. Warung Kopi 3 in 1, tanggal 22 Januari 2015 di Banda Aceh.
- Ferrand G. 1914. *Relations de voyages et textes geographiques : Arabes, Persan et Turks relatifs a l'Extreme-Orient du VIIIe au XVIIIe siecles, traduits, II*, hlm. 440-450.
- Fukuyama F. 2005. *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Cornell University Press, New York.
- Hill AH. 1960. *Hikayat Raja-raja Pasai*, Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London. Library, MBRAS.
- Hood C, Margetts HZ. 2007. *The Tools of Government in the Digital Age*. Palgrave MacMillan, New York.
- Ishak OS. 2016. *Satu Dasawarsa Implementasi Demokrasi Di Aceh, Dari Perspektif HAM*. Seminar Satu Dekade Perkembangan Demokrasi di Aceh dan Kontribusi Bagi Nasional. 16 Mei 2016 di AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala. Kerjasama Jaringan Survey Initiative (JSI) dan Unsyiah, IKA Unsyiah, Aceh Connection Foundation serta Elhanief Group.
- Jafar M, Fadhil R, Anggraini T, Mashudi, Wibawa F, Lubis S, Siahaan H, Gaussyah M, Butami AL, Santoso T. 2007. *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*. Kemitraan-Partnership, Jakarta.
- Kern H. 1918. *De Nāgarakṛtāgama, slot. Spraakkunst van het Oudjavaansch*. M. Nijhoff.
- Kingsbury D. 2016. *Surat Terbuka untuk Masyarakat Aceh. Kolom Droe Keu Droe*. *Harian Serambi Indonesia* 25 Mei 2016.
- KIP Aceh 2014. *Laporan Hasil Pemilu Aceh*. Komisi Independen Pemilihan Aceh, Banda Aceh.
- Kong Y. 2000. *Muslim Tionghoa Cheng Ho: misteri perjalanan muhibah di Nusantara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lombard D. 2008. *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Mohamad M. 2011. *Pidato Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Pertemuan Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh se-Nusantara*. Memorial Tun Hussein Onn, Komplek Bukit Perdana Kuala Lumpur. VCD. IAAS, Aceh Club, IMAM, MASA dan Peniaga Melayu Aceh.
- Moquette, Pierre J. 1913. *De Oudste Vorsten van Samudra-Pase. Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst*, Batavia.
- Paskarina C. 2016. *Capaian Kinerja Pembangunan dan Gambaran Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Aceh*. *Analisis Situasi* 4 (1), 1-10.
- Pelliot P. 1991. *Notes on Marco Polo : ouvrage posthume*, Paris : Imprimerie Nationale, 1959-1963.
- Pemkot Banda Aceh .1998. *Kota Banda Aceh hampir 1000 tahun*. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- Polo M. 1871. Sir Henry Yule, ed. *The book of Ser Marco Polo: concerning the kingdoms and marvels of the East*, Vol. 2. Murray.
- Prang AJ. 2013. *ALA-ABAS Bak Musim Durian*. *Harian Serambi Indonesia* 28 Februari 2008. <http://aceh.tribunnews.com/2013/02/28/ala-abas-bak-musim-durian>.
- Ramli H, Gani TRMA. 1985. *Adat Aceh*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Reid A. 2005. *Asal mula konflik Aceh: dari perebutan Pantai Timur Sumatra hingga akhir Kerajaan Aceh abad ke-19*. Jakarta.
- Ricklefs MC. 1991. *A History of Modern Indonesia since c.1300*, 2nd Edition, Stanford: Stanford University Press.

- Suryadinata L. 2005. Admiral Zheng He & Southeast Asia. Institute of Southeast Asian Studies. International Zheng He Society.
- Wicks RS. 1992. Money, markets, and trade in early Southeast Asia: the development of indigenous monetary systems to AD 1400. SEAP Publications.
- Yan-shou L. 627. Bei-shi which covers the period from A.D. 386 to 618 (Tionghoa: 北史; Pinyin: Běishǐ).
- Zentgraaf HC. 1983. Aceh. Penerbit Beuna, Jakarta.

<><><><>

Profil Penulis

RAHMAT FADHIL menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Pertanian Unsyiah bidang Teknologi Pasca Panen, dan S2 di Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bidang Teknik Proses Pertanian (*Agricultural Proses Engineering*). Bekerja tetap sebagai Dosen Unsyiah sejak tahun 2005 dan pernah aktif di beberapa organisasi seperti Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh, Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Perwakilan Aceh, Perhimpunan Ahli Teknik Pertanian (PERTETA), Masyarakat Biodiversiti Indonesia (MBI), *International Association of Acehnese Scholars* (IAAS) Kuala Lumpur, dan *Asia-Pacific Chemical, Biological, and Environment Engineering Society* (APCBEEES) Hongkong. Selain itu juga pernah bekerja dalam beberapa kegiatan akademik, sosial, politik & kemasyarakatan seperti Tim Ahli Jaringan Survey Inisiatif (www.jsithopi.org) (2016), Tim Analisis Sosial Politik dan Kemasyarakatan Dinas Kesbangpol & Linmas Propinsi Aceh (2014), Direktur Pelatihan *Career Development Centre* (CDC) Unsyiah (2013-2015), Anggota Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Propinsi Aceh (2013-2016), Direktur Eksekutif *STIGMA Institute* (2013-2015), Koordinator Wilayah Aceh Beastudi Etos Indonesia Dompot Dhuafa (2013-2015), Analisis Pemilu dan Pilkada pada *The Aceh Institute* (2012), Direktur Lembaga Manajemen Terapan TRUSTCO Aceh (2006-2008), dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) Aceh yang merupakan pilkada serentak pertama di Aceh (2006). Beberapa buku yang pernah ditulis adalah Kadalisisasi Pilkada Aceh (STIGMA Institute), Membingkai Mahligai Cinta Membangun Madrasah untuk Bangsa (KOMETIF), Praktek Ibadah dan Mentoring untuk Perguruan Tinggi (UP3AI Unsyiah), Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh (Kemitraan-Partnership). Beberapa tulisan ilmiah populer dalam bentuk opini juga dapat ditemukan pada berbagai harian lokal dan online di Aceh, diantara judul-judul tulisannya adalah Pemerintah Aceh 'Sang na, Sang tan', Hasan Tiro-isme, Politik dan Pengkhianat, Orang-orang Aneh di Bulan Ramadhan, Presiden Pilihan *Quick Count*, dan lain sebagainya.

Site: http://www.researchgate.net/profile/Rahmat_Fadhil